

UNIVERSITAS INDONESIA

T E S I S

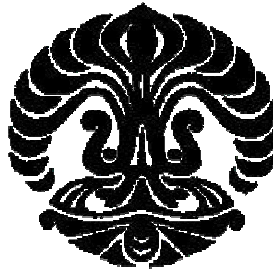
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENANGANAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DKI JAKARTA
Studi Kasus di Kota Jakarta Pusat**

Oleh

**Nama : Silvia Andrianingsih
NPM : 0606017725
Program Studi : Ilmu Administrasi
Kekhususan : Administrasi dan
Kebijakan Publik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA**

**JAKARTA
2008**



UNIVERSITAS INDONESIA

T E S I S

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENANGANAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DKI JAKARTA
Studi Kasus di Kota Jakarta Pusat**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister Sains (M.Si.) dalam Ilmu Administrasi**

Oleh :

Nama : Silvia Andrianingsih

NPM : 0606017725

Program Studi : Ilmu Administrasi

Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Publik

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA**

**JAKARTA
DESEMBER, 2008**

**THE UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE
DEPARTMENT OF ADMINISTRATION SCIENCE
POSTGRADUATE PROGRAM
PROGRAM STUDY OF ADMINISTRATION SCIENCE
MAJORING ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY**

ABSTRACT

**Silvia Andrianingsih
0606017725**

**POLICY IMPLEMENTATION OF STALLER ARRANGEMENT IN DKI JAKARTA
– A STUDY CASE OF CENTRAL JAKARTA**

**xii+143 Pages + 12 Tables + 13 Figures+ 3 Attachments
Bibliography : 18 Books, 2 Journals, 13 Legal Stipulation, 5 Previous
Researches, 11 Articles (year 1980 – 2008)**

The sporadic, yet unorganized location of stallers seems to indicate the absence of arrangement by the local government of DKI Jakarta especially Central Jakarta. Therefore, a reaserch has been conducted in order to find out the policy implementation of staller arrangement in DKI Jakarta with a case study of Central Jakarta aiming to (1) explain the policy implementation conducted by the local government of DKI Jakarta in arranging stallers; (2) elaborate factors contributing to the success and failure of the policy implementation.

There are four analyzing tools used: communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure (Edward III. 1980 page. 9-10). Furthermore the analysis also conducted by considering the external factors in regards to Grindle (1980) saying that the success of policy implementation is influenced by two major variables namely content of policy and context of implementation. The research uses positivistic qualitative method and applies illustrative model in data analysis.

Research shows that the policy implementation is not only influenced by the internal factors, but also the external ones, such as *premanism* (bullying practices), people's responses, and monetary condition of the country. A set of recommendation is then given, such as enhancing the capability of the implementors both physically and intellectually, one stop training service by institution of Cooperation, Small and Middle Business to both formal and informal/illegal stallers, and conducting *premanism* eradication systematically together with the Police.

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK**

ABSTRAK

**Silvia Andrianingsih
0606017725**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DKI
JAKARTA – STUDI KASUS DI KOTA JAKARTA PUSAT**

**xii+143 Halaman + 12 tabel + 13 Gambar+ 3 Lampiran.
Daftar Pustaka: 18 Buku, 2 Jurnal, 13 Produk Hukum, 5 Hasil Penelitian, 11
Artikel (Tahun 1980 – 2008)**

Keberadaan PKL yang sporadis dan tak teratur mengesankan tidak ada penanganan yang jelas dari pemerintah DKI Jakarta khususnya Jakarta Pusat. Oleh karenanya dilakukan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan PKL di DKI Jakarta yang bertujuan untuk: (1) Menjelaskan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani PKL saat ini; (2) Memaparkan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan kegagalan implementasi penanganan PKL di DKI Jakarta.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 empat faktor atau variabel penting dalam kebijakan publik, yaitu: komunikasi (*communication*), sumber-sumber (*resources*), kecondongan (*dispositions*), atau perilaku (*attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) (Edward III. 1980 hal. 9-10). Selain itu analisis juga dilakukan dengan melihat beberapa faktor eksternal sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (1980) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Penelitian dilakukan dengan metode positis kualitatif dengan menggunakan model analisis ilustratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal tetapi juga oleh faktor-faktor eksternal, seperti premanisme, sikap masyarakat dan kondisi perekonomian negara, Rekomendasi yang diberikan oleh penelitian antara lain meningkatkan kemampuan personel fisik dan wawasan, serta etika para pelaksanaan kebijakan, pembinaan satu atap oleh Dinas KUKM untuk PKL resmi dan ilegal, dan merancang upaya sistematis pemberantasan premanisme dengan bekerjasama dengan pihak Kepolisian.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah
hasil karya saya sendiri, dan
seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

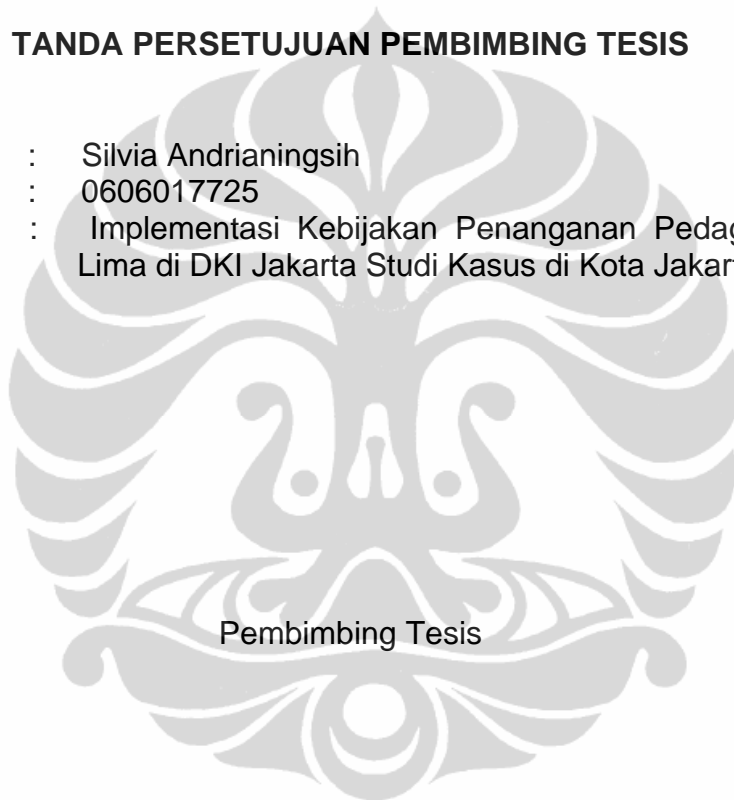


Silvia Andrianingsih

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

NAMA : Silvia Andrianingsih
NPM : 0606017725
JUDUL : Implementasi Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki
Lima di DKI Jakarta Studi Kasus di Kota Jakarta Pusat



(Prof. Dr. Eko Prasajo)

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

NAMA : Silvia Andrianingsih
NPM : 0606017725
JUDUL : Implementasi Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima di
DKI Jakarta Studi Kasus di Kota Jakarta Pusat

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Indonesia pada tanggal lima, bulan Desember, tahun Dua Ribu Delapan dan telah dinyatakan: **LULUS**

Tim Penguji:

Ketua Sidang:
Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein (.....)

Pembimbing:
Prof. Dr. Eko Prasajo (.....)

Pembaca Ahli:
Dr. Irfan Ridwan Maksum, S.Sos., M.Si. (.....)

Sekretaris Sidang:
Zuliansyah P. Zulkarnain, S.Sos., M.Si. (.....)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim. Alhamdulillahirobbil'alamiin, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga yaumul akhir aamiin. Hanya dengan berkah dan rahmat ALLAH SWT saja, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis dengan judul **Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima, Studi Kasus Kota Jakarta Pusat** selama lebih kurang dua semester.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, khususnya kepada Prof. Dr. Eko Prasjojo atas kesabaran dan kegigihan beliau dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini; Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia beserta segenap anggota, perpustakaan Pasca Fisip UI: Bapak Pri, Bapak Pur, Ibu Ina, dan Ibu Ana; Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk tugas belajar di Universitas Indonesia dan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan. Terima kasih dan doa penulis haturkan kepada para ustadz Majelis Dhuha atas ilmu dan ketauladanan yang diberikan: Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H, M.H., Letjen (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Bachtiar Nasir, Lc., M.M., H. Ferrynur, S.Sos., dan Dra. Hj. Jannah. Terima kasih penulis ucapkan kepada segenap pengurus dan jamaah Majelis Dhuha MKRI, pimpinan dan pengurus Pesantren BSC Al Futuwah, seluruh rekan angkatan 14 (publik dan bisnis) atas dukungan dan doa, serta bantuan dari Saudara Irvan (transkriptor), dan Saudara Wiwik (fotografer). Penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada para narasumber penelitian.

Rangkaian kata tak kan mampu mewakili rasa syukur penulis yang telah dianugerahi keluarga yang penuh ketulusan kasih sayang, dan sangat penulis cintai: Haris Effendi, suami sholeh nan hanif, Mama Muninggar, Papa Jatino Subeny, Ibu Las, *my mother-in-law*, Alm. Pak Mahir, Alm. Pak Rijoso Soedjaswadi, Bu Triyani, adik-adik: Andri, Alm. Rendy, Bintoro, Rita, Tunggul, Dede, para biyung: Te Helti, Te Roroh, Budhe Pung, Budhe Sri Haryati, Keluarga Besar H.M. Nasocha, Bc.Hk., keluarga besar Majenang dan keluarga besar Mahir. Jazakumullahu khairan katsiran, semoga ALLAH memberikan balasan yang lebih baik, aamiin. Alhamdulillahirobbil'alamin. Semoga ALLAH 'Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmat, barokah, dan perlindungan kepada kita semua; Allahumma aamiin.

Jakarta, 5 Desember 2008

Silvia Andrianingsih

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
ABSTRACT.....	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	v
LEMBARAN PENGESAHAN TESIS	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	Vii
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Signifikansi Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN.....	16
A. Output Penelitian Sebelumnya	17
A.1. Hasil-Hasil Penelitian Sebelumnya	17
A. 2. Tabulasi Hasil Penelitian Terdahulu dan Keunggulan Penelitian Terbaru	24
B. Kerangka Teori	26
B.1. Kebijakan Publik	26
B.2. Implementasi Kebijakan Publik	27
B.3. Syarat Keberhasilan Implementasi Kebijakan	29
B.3.1. Komunikasi	29
B.3.2. Sumber-sumber	32
B.3.3. Kecenderungan/Perilaku	35
B.3.4. Struktur Birokrasi	36
B.4. Kebijakan yang Cenderung Mengalami Masalah	39
B.5. Faktor Eksternal	41
B.5.1. Model Implementasi Kebijakan Marilee S. Grindle	41
B.5.2. Model Implementasi Kebijakan Donald Van Meterdan Carl E. Van Horn	42
B.6. Operasionalisasi Konsep	43
C. Metode Penelitian	45
C.1. Pendekatan Penelitian	45
C.2. Tipe Penelitian	45

	C.3.	Teknik Pengumpulan Data	46
	C.4.	Teknik Analisis Data	47
	C.5.	Narasumber	47
	C.6.	Objek dan Lokasi Penelitian	48
	C.7.	Keterbatasan Penelitian	48
BAB III		GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	49
	A.	Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta	49
	B.	Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima di Jakarta	50
	C.	Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima di Jakarta	53
	C.1.	Penataan Lokasi	54
	C.2.	Fasilitas	56
	C.3.	Perijinan	57
	C.4.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	57
	C.5.	Penertiban	59
	D.	Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta	61
	D.1.	Kewenangan Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi dalam Bidang Tramtib dan KUKM	62
	D.2.	Kewenangan Camat Bidang Tramtib dan KUKM.....	64
	D.3.	Kewenangan Lurah Bidang Tramtib dan KUKM.....	65
	D.4.	Pembinaan, Evaluasi, dan Pelaporan.....	66
	E.	Dinas Pelaksana Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima di Provinsi DKI Jakarta	67
	E.1.	Dinas Tramtib	67
	E.2.	Dinas KUKM.....	70
BAB IV		IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PEDAGANG KAKILIMA DI DKI JAKARTA	73
	A.	Komunikasi.....	73
	A.1.	Komunikasi antar Pelaksana Kebijakan.....	73
	A.2.	Komunikasi antara Pelaksana Kebijakan dan PKL	76
	B.	Sumber Daya.....	77
	B.1.	Sumber Daya Manusia Pelaksana Kebijakan (Staf)	78
	B.2.	Informasi	80
	B.3.	Wewenang dalam Pelaksanaan Kebijakan	83
	B.4.	Fasilitas Pendukung Pelaksana Kebijakan	91
	C.	Disposisi/Kecenderungan/Perilaku	92
	C.1.	Kecenderungan Pelaksana Kegiatan.....	93
	C.2.	Dampak dari Kecenderungan	95
	D.	Struktur Birokrasi	96
	D.1.	Prosedur Operasional Standar	96
	D.2.	Pemisahan dalam Pelaksanaan Kebijakan (Fragmentasi)	97
	E.	Kebijakan yang Cenderung Mengalami Masalah	99
	F.	Perubahan yang Diinginkan melalui Implementasi Kebijakan Penanganan PKL di DKI Jakarta	101
	F.1.	Perubahan yang Diinginkan oleh Pelaksana Kebijakan..	101
	F.2.	Perubahan yang Diinginkan oleh PKL	101
	G.	Faktor Eksternal	102

G.1.	Premanisme	102
G.2.	Sikap Masyarakat	106
G.3.	Kondisi Perekonomian Negara	108
BAB V.	SIMPULAN DAN SARAN	110
A.	SIMPULAN	110
B.	SARAN	110
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	118



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 Jumlah Kepadatan Penduduk per Wilayah Kotamadya, Januari 2008	1
Tabel 2 Banyaknya Usaha Kakilima Jakarta Menurut Omset Per-Hari dan Kotamadya DKI Jakarta	5
Tabel 3 Banyaknya Usaha Kakilima Menurut Penggunaan Jenis Lahan Usaha dan Kotamadya DKI Jakarta	6
Tabel 4 Kekurangan dan Keunggulan Penelitian Lama	24
Tabel 5 Operasionalisasi Konsep Penelitian	44
Tabel 6 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penataan Lokasi dan Usaha PKL	55
Tabel 7 Fasilitas Lokasi Usaha PKL	56
Tabel 8 Persyaratan Mendapatkan Perijinan Lokasi Usaha PKL	57
Tabel 9 Bentuk Pembinaan terhadap PKL oleh Dinas KUKM	58
Tabel 10 Bentuk Pengawasan dan Pengendalian Usaha terhadap PKL oleh Dinas KUKM	58
Tabel 11 Kekuatan Personil Dinas Tramtib Provinsi DKI Jakarta	79
Tabel 12 Rekapitulasi Usulan Lokasi Sementara Usaha Mikro/PKL Tahun 2006 di Provinsi DKI	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1 PKL Menutup Badan Jalan	3
Gambar 2 Grafik Jumlah Pungutan yang dibayar PKL tahun 2006	4
Gambar 3 Grafik Banyaknya Usaha Kaki Lima menurut Penggunaan Jenis Lahan Usaha di DKI Jakarta	6
Gambar 4 Dampak Langsung dan Tidak Langsung pada Implementasi	39
Gambar 4 Alur Penelitian Kualitatif	47
Gambar 5 Struktur Organisasi Dinas Tramtib DKI Jakarta	69
Gambar 6 Struktur Organisasi Dinas KUKM DKI Jakarta	72
Gambar 7 Alur Komunikasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan PKL	75
Gambar 8 Alur Koordinasi Penertiban dalam Lingkup Dinas Tramtib	85
Gambar 9 Alur Pembinaan PKL Resmi dan Ilegal	86
Gambar 10 Alur Pengaturan Lokasi PKL Resmi	87
Gambar 11 Alur Proses Perijinan Usaha Dagang PKL Resmi	90
Gambar 12 Alur Proses Perijinan Usaha Dagang PKL Ilegal	90